

Direktur Advokasi dan Kerjasama Desa dan Perdesaan : Kampus Berperan dalam Fasilitasi Pemberdayaan Desa

Achmad Sarjono - KOTAMALANG.SELARASNEWS.COM

Jan 4, 2023 - 23:59

The screenshot shows a Zoom meeting interface. On the left, a slide is displayed with the following content:

- SDGs DESA ADALAH ARAH KEBIJAKAN, BUKAN PROGRAM, BUKAN PROYEK**
- Arah kebijakan**
 - Pendataan
 - Hasil olahan, yaitu indikator capaian atau skor
 - Analisis untuk perencanaan pembangunan desa jangka pendek/tahunan, jangka menengah, jangka panjang (sampai 2030)
 - Seluruh bahan menjadi subyek untuk didialogkan dalam Musyawarah Desa
 - Hanya keputusan musyawarah desa yang diimplementasikan
- Bukan program, bukan proyek desa maupun Kemendesa PDTT**
 - Mencakup berbagai urusan antar sektor, swasta dan masyarakat
 - Mencakup berbagai urusan antar level pemerintahan: pusat, provinsi, kab/kota, (kec), desa
 - Dapat dipertandingkan dan dikerjasamakan lintas negara (global village)

On the right, a video feed shows Muhammad Fachri, a man with glasses, speaking. The Zoom meeting controls are visible at the bottom, including 'Unmute', 'Start Video', 'Participants', 'Chat', 'Share Screen', 'Record', 'Reactions', and 'Apps'. The system tray at the bottom shows the date as 04 Jan 23 and the temperature as 28°C.

Muhammad Fachri, S.STPi, Msi, selaku Direktur Advokasi dan Kerjasama Desa dan Perdesaan

KOTA MALANG - Sinergi pentahelix dibutuhkan untuk mempercepat pembangunan desa. Hal ini disampaikan oleh Muhammad Fachri, S.STPi, Msi, selaku Direktur Advokasi dan Kerjasama Desa dan Perdesaan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi saat memberikan paparan dalam Workshop Koordinasi dan Sinkronisasi Mahasiswa Membangun 1000 Desa, secara daring pagi tadi.

Menurut Fachri, banyak hal yang telah dilakukan desa untuk membangun desanya. "Pembangunan maupun pengentasan kemiskinan, tantangannya banyak. Terutama sebagian desa masih minim menciptakan sumber ekonomi baru bagi desa, masih memanfaatkan dana desa dengan konsumtif bukan produktif", ujarnya, Rabu (4/1).

Pemerintah, imbuah Fachri, melalui UU Desa Rekognisi dan Subsidi, telah memberi kewenangan kepada desa. “Desa saat ini sangat mewah, memiliki uang dan kewenangan. Di sini, peran penting universitas untuk mendampingi, memfasilitasi dan mengadvokasi agar dapat memanfaatkan seluruh sumber daya di dalamnya. Ada tiga prioritas kita dalam penggunaan dana desa di tahun 2023, yaitu pemulihan ekonomi nasional, program prioritas nasional, serta mitigasi dan penanganan bencana alam dan non alam”, jelasnya.



Pemberdayaan Masyarakat Desa, menurut Kepala Dinas PMD Prov. Jatim, Ir. Budi Sarwoto, M.M, mengacu pada tiga pilar Nawa Bhakti Satya. “Tujuannya sendiri, adalah untuk menurunkan angka kemiskinan. Jatim penyumbang perekonomian terbesar kedua dgn angka 25,21 %. Jatim juga memiliki angka tertinggi kemiskinan nasional dan desa mandiri di jawa timur memiliki angka tertinggi se-Indonesia. di Jatim tidak ada desa tertinggal dan sangat tertinggal, memiliki angka desa mandiri tertinggi. Hampir 25 persen desa di Jawa Timur sudah menjadi desa mandiri”, jelasnya.

Program Mahasiswa Membangun Desa 2023 merupakan kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa Universitas Brawijaya. Menurut Dr. Sujarwo, S.P., M.P., program ini akan dilaksanakan di 1000 desa. “Kegiatan ini akan dilaksanakan di sela semester 4 dan 5. Rencananya akan dilaksanakan pembekalan pada Februari dan Maret mendatang, dan untuk pelaksanaannya sendiri akan dilakukan mulai Juni sampai Agustus”, pungkas pria yang menjabat sebagai Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Pertanian ini. (*)